Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



EVALUASI PROGRAM TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH (TPS) 3R DI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

Ayu Gabriela Erta[1], Taufik Arbain[2]

[1-2] Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat

ARTICLE INFO

Article history:
Received Januari, 2026
Revised Januari, 2026
Accepted Januari, 2026
Available online Januari, 2026

ayugabrielaerta@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

ABSTRAK

Program Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R merupakan instrumen kebijakan publik yang dirancang untuk menggeser paradigma pengelolaan sampah dari pendekatan kumpul angkut buang menuju pengurangan di sumber. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi kebijakan TPS 3R di Kecamatan Banjarmasin Utara dengan menggunakan kerangka evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, khususnya pada aspek efektivitas, kecukupan, dan responsivitas kebijakan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menemukan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik implementasi, yang tercermin dari belum tercapainya tujuan pengurangan sampah secara optimal dan tidak terlaksanakannya secara menyeluruh dalam proses 3R. Meskipun dalam penelitian ditemukan bahwa progam TPS 3R didukung oleh kerangka regulasi yang memadai. Namun efektivitas dan kecukupan implementasi masih terhambat oleh lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, rendahnya disposisi pelaksana dan partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya struktur birokrasi dan sistem operasional. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan TPS 3R tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif. Maka dari itu peneliti merekomendasikan pemerintahan kota Banjarmasin untuk lebih memahami tentang kapasitas implementasi dimana perlunya beberapa aspek yang ditemukan peneliti untuk mendorong implementasi progam TPS 3R dapat dianggap terlaksanakan dengan baik.

Kata Kunci: Kebijakan Publik; TPS 3R; Pengelolaan Sampah; Implementasi Kebijakan; Evaluasi Kebijakan

ABSTRACT

The Waste Processing Facility (TPS) 3R program constitutes a public policy instrument aimed at shifting waste management practices from a collect-transport-dispose approach toward source-based waste reduction. This study aims to evaluate the implementation of the TPS 3R policy in North Banjarmasin District by applying William N. Dunn's policy evaluation framework, particularly focusing on policy effectiveness, adequacy, and responsiveness, as well as identifying factors that hinder policy implementation. A descriptive qualitative approach was employed through field observations, in-depth interviews, and document analysis. The findings reveal a significant gap between policy design and implementation practices, as indicated by the failure to optimally achieve waste reduction targets and the incomplete execution of the 3R process. Although the TPS 3R program is supported by an adequate regulatory framework, the

*Corresponding author
E-mail addresses: ayugabrielaerta@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



effectiveness and adequacy of its implementation remain constrained by weak policy communication, limited resources, low disposition among implementers and community participation, as well as suboptimal bureaucratic structures and operational systems. These findings demonstrate that the success of the TPS 3R policy is not solely determined by its normative framework, but largely depends on implementation capacity. Therefore, this study recommends that the Banjarmasin City Government strengthen policy implementation capacity by improving institutional arrangements, resource allocation, and coordination mechanisms to ensure the sustainable implementation of the TPS 3R program.

***Keywords**: Public Policy; TPS 3R; Waste Management; Policy Implementation; Policy Evaluation*

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini berangkat dari permasalahan lingkungan hidup telah menjadi isu krusial yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia. khususnya dalam hal pengelolaan sampah. Bank Dunia menunjukkan bahwa secara global, dunia menghasilkan lebih dari 2 miliar ton sampah padat setiap tahunnya. Ironisnya, jumlah ini diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai 3,4 miliar ton pada tahun 2050 jika tidak ada intervensi serius dalam sistem pengelolaan sampah. Selain itu, penelitian Jambeck (2015) mengungkapkan bahwa setiap tahunnya sekitar 8 juta ton sampah plastik masuk ke laut, menyebabkan pencemaran air dan kerusakan ekosistem laut yang sangat merugikan, baik secara ekologis maupun ekonomi.

Fenomena ini tidak luput dari Indonesia, yang kini menghadapi krisis pengelolaan sampah dalam skala nasional. Berdasarkan data terbaru dari Bank Dunia (2023), Indonesia menempati posisi kelima di dunia sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar ke laut, dengan total 56.333 ton plastik masuk ke perairan pada tahun 2021. Selain itu, Indonesia juga menempati peringkat keempat sebagai negara penghasil sampah makanan terbesar, yakni mencapai 20,94 juta ton pada tahun 2020 (UNEP dalam Goodstats.id, 2024).

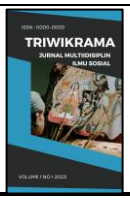
Pemerintah Indonesia merespon krisis ini melalui berbagai kebijakan dan regulasi, salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menerbitkan Permen PUPR Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. Serta Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Ketiga regulasi tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong model pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Namun demikian, implementasi kebijakan ini di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di kota-kota besar yang memiliki karakteristik urban dan padat penduduk. Kota Banjarmasin juga tidak luput dari persoalan ini. Berdasarkan data yang dihimpun, diketahui bahwa total produksi sampah di Kota Banjarmasin mencapai kurang lebih dari 400 ton per hari. Diketahui bahwa sekitar 52% diantaranya merupakan sampah organik yang sebenarnya dapat dikelola dan dimanfaatkan kembali apabila diproses dengan tepat.

Pada 1 Februari hingga 31 Juli 2025, Status darurat sampah diberlakukan di Kota Banjarmasin melalui Surat Pernyataan Tanggap Darurat Sampah. Surat bernomor 600.4.15/0121/SET-DLH/11/2025. Hal ini sebagai tindak lanjut penyegelan TPA Basirih, satu-satunya lokasi akhir penampungan sampah di Kota Banjarmasin, yang mengalami kelebihan kapasitas (*overload*).

Penetapan status ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan langkah-langkah luar biasa, termasuk penyesuaian sistem pengelolaan sampah, optimalisasi fasilitas pengolahan alternatif, serta percepatan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



di tingkat sumber. (RRI.co.id, 2025). Maka dari itu Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R dirancang sebagai sarana pengolahan sampah berbasis masyarakat di tingkat kecamatan, dengan mengusung prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Melalui pendekatan ini, pengelolaan sampah tidak lagi berfokus pada pembuangan. Melainkan pada pengurangan sampah sejak dari sumbernya, pemilahan yang efektif, dan pengolahan untuk mendapatkan nilai ekonomis, seperti kompos dan produk daur ulang.

Secara teoritis, kebijakan tersebut mengandung potensi untuk menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap sistem persampahan di Kota Banjarmasin. Hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980), yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Jika keempat elemen ini berjalan dengan baik, maka Program Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R seharusnya mampu mencapai efektivitas yang tinggi dalam mengurangi beban TPA dan menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan partisipatif.

Namun, dalam praktik pelaksanaannya di lapangan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R khususnya di Kecamatan Banjarmasin Utara belum mampu beroperasi secara optimal. 8 unit Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R yang telah dibangun di Kecamaran Banjarmasin Utara justru menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis, seperti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemilahan sampah di sumber yaitu rumah masing-masing, minimnya edukasi dan pelatihan teknis bagi pekerja sebagai pengelola, keterbatasan jumlah dan kapasitas tenaga kerja, serta kerusakan fasilitas atau peralatan akibat kurangnya pemeliharaan.

Kebijakan publik idealnya dirancang dan diimplementasikan secara efektif, sebab keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak hanya menjadi ukuran utama keberhasilan, tetapi juga menjadi dasar evaluatif dalam menilai apakah suatu kebijakan layak untuk dilanjutkan, diperluas, atau bahkan dihentikan. Dalam kerangka evaluasi kebijakan publik, William N. Dunn (2003) mengemukakan beberapa kriteria keberhasilan kebijakan yang komprehensif.

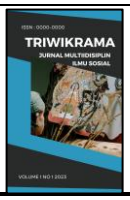
Pertama adalah efektivitas, yaitu sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Kedua, efisiensi yang menilai apakah manfaat yang dihasilkan sepadan dengan biaya dan sumber daya yang digunakan. Ketiga adalah kecukupan, yakni kemampuan kebijakan dalam mengatasi masalah secara menyeluruh. Keempat, kesetaraan yang memastikan manfaat kebijakan tersebar secara adil ke seluruh kelompok masyarakat. Kelima, responsivitas yaitu kemampuan kebijakan dalam menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dan terakhir, keenam kelayakan yang menilai apakah kebijakan dapat dijalankan secara teknis, politis, dan administratif.

Sebagai landasan operasional dalam mengevaluasi belum optimalnya implementasi Program Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R di Kota Banjarmasin, penulis merujuk pada teori evaluasi kebijakan publik dari Charles O. Jones (1977). Jones menjelaskan bahwa proses evaluasi kebijakan mencakup dua komponen utama: pertama, pengukuran hasil yang dilihat dari segi efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan. Kedua, tindak lanjut yang dapat berupa revisi kebijakan, penghentian, atau penguatan pelaksanaan kebijakan. Model evaluasi ini penting untuk menilai apakah kebijakan berjalan sesuai dengan harapan dan konteks lokal.

Dalam konteks akademik, berbagai studi sebelumnya telah meneliti kebijakan pengelolaan sampah di berbagai wilayah. Misalnya, Adi Kresna pada tahun 2024 meneliti pengelolaan sampah berbasis Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R R di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan berfokus pada kebijakan pengelolaan sampah di daerah tersebut. Hasilnya berupa selain rendahnya partisipasi masyarakat, pengelolaan Tempat Pengolahan

*Corresponding author
E-mail addresses: ayugabrielaerta@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Sampah Terpadu (TPST) 3R juga terkendala oleh fasilitas yang belum memadai. Mesin dan peralatan yang digunakan masih sederhana, belum berbasis teknologi, serta sering kali tidak dapat beroperasi optimal akibat terbatasnya pasokan listrik dan pembiayaan. Kondisi ini menghambat proses pengolahan sampah secara efektif.

Selain itu peneliti lain, Nurul Akramila di tahun 2024 mengangkat isu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar yang memperoleh hasil dimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TPST 3R sering kali hanya bersifat simbolis (kategori tokenism), yang disebabkan oleh keterbatasan fasilitas serta rendahnya pemahaman terhadap konsep *circular economy*. Kemudian, penelitian dari Heryani Br Keliat (2022) yang menganalisis persoalan pengelolaan sampah di Kecamatan Namo Rambe, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Namo Rambe masih belum optimal, terutama pada aspek hukum, kelembagaan, teknis operasional, dan partisipasi masyarakat. Kendala utama yang diidentifikasi adalah kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, minimnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran masyarakat.

Namun, studi-studi tersebut cenderung lebih menyoroti aspek implementasi secara umum atau partisipasi masyarakat tanpa mengevaluasi secara mendasar dan menyeluruh tentang mengapa efektivitas Program Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R belum berjalan optimal. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah yang belum banyak dikaji. Lingkup evaluasi dalam penelitian ini dirancang secara spesifik, dengan fokus pada unit geografis di tingkat kecamatan, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada Kecamatan Banjarmasin Utara. Pendekatan berbasis wilayah lokal dipilih karena lebih memungkinkan untuk memperoleh data yang akurat, detail, dan kontekstual, terutama dalam hal partisipasi masyarakat, yang diketahui menjadi salah satu isu krusial dalam belum optimalnya pengelolaan kebijakan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R.

Berdasarkan keseluruhan latar belakang tersebut, peneliti berharap dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi eksisting implementasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R di Kecamatan Banjarmasin Utara, mulai dari aspek infrastruktur, pengelolaan, partisipasi masyarakat, hingga capaian kebijakan. Penelitian ini dianggap penting sebagai kontribusi ilmiah dalam bidang administrasi publik dan kebijakan lingkungan, sekaligus sebagai instrumen evaluatif terhadap implementasi kebijakan lingkungan di tingkat lokal, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala utama yang menghambat keberhasilan kebijakan serta mengeksplorasi potensi pengembangan ke depan.

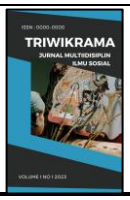
Evaluasi ini penting bukan hanya sebagai sarana akademik, tetapi juga sebagai bahan masukan strategis bagi *stakeholder* terkait, seperti pemerintah daerah, pengelola TPS 3R, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lingkungan lokal. Temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkuat argumentasi mengenai pentingnya kebijakan yang adaptif, dukungan anggaran, serta pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi pengelola Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R. Dengan demikian, Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R tidak hanya menjadi solusi sementara untuk pengurangan volume sampah, tetapi juga bertransformasi menjadi pusat edukasi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Dengan mempertimbangkan berbagai pertimbangan tersebut, maka penelitian ini diangkat dengan judul: "Evaluasi Program Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R di Kecamatan Banjarmasin Utara".

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (2005) menekankan bahwa kebijakan publik mencakup keputusan aktif dan pasif pemerintah. Jika pemerintah memutuskan untuk tidak bertindak terhadap suatu isu, keputusan itu tetap merupakan bentuk kebijakan. Misalnya, tidak mengatur soal penggunaan kendaraan listrik juga merupakan keputusan kebijakan. Sedangkan menurut Anderson (2011),

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



yaitu serangkaian tindakan yang disengaja oleh aktor tertentu untuk menangani persoalan publik. Kebijakan bukanlah tindakan spontan, tetapi bagian dari strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Ataupun menurut pelopor dalam analisis kebijakan, yaitu Harold D. Lasswell (1951) menekankan aspek politik dan distribusi sumber daya, menunjukkan bahwa kebijakan adalah alat untuk menentukan "siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana".

Dari banyak pengertian dari para ahli maka dapat dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik bukan hanya soal peraturan atau undang-undang, tetapi merupakan hasil dari proses politik dan administratif yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, nilai, dan tujuan masyarakat. Kebijakan publik merupakan suatu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik dan mencapai tujuan negara, pada penelitian ini kebijakan publik yang diteliti berupa kebijakan pemerintah kota Banjarmasin yaitu Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R.

Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) yang dikutip oleh Abdul Wahap (1997) merumuskan bahwa proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sumber-sumber yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan terdiri dari tiga komponen yang saling mendukung: sumber daya manusia, kemampuan anggaran (secara keuangan), dan kemampuan organisasi, baik yang dilakukan oleh entitas swasta maupun pemerintah secara individu atau kelompok.

Berbagai model implementasi kebijakan dapat digunakan untuk melihat bagaimana proses implementasi kebijakan berlangsung. Wayne Parson membagi model implementasi kebijakan yaitu: Model analisis kegagalan (*The Analysis of failur*e), Model Rasional (*Top down*), Model pendekatan *bottom-up* dan teori-teori hasil sintesis (*Hybrid theories*).

Evaluasi Kebijakan Publik

Pejabat pembuat kebijakan memiliki kewenangan untuk menerapkan kebijakan untuk kepentingan publik. Menurut M. Irfan Islamy isi, pelaksanaan, dan efek kebijaksanaan dapat dibahas dalam penilaian kebijaksanaan. Ketiga komponen ini sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Proses Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai variabel, termasuk variabel individu (SDM) dan variabel organisasional. Variabel-variabel tersebut mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan atau saling mempengaruhi dan berhubungan satu sama lain. Menurut George C. Edward III (1980) implementasi kebijakan adalah salah satu tahap, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensikonsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Suatu kebijakan sekalipun diimplementasikan dengan baik, namun bila tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan.

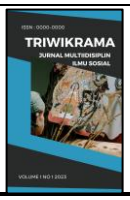
Dalam pandangan George C. Edward III (1980) juga, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: Komunikasi *(communication)*, Sumber Daya (*Resources*), Sikap (*Dispositions*), dan Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structure*)

2. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kebijakan TPST 3R di Kecamatan Banjarmasin Utara. Adapun informan penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan

*Corresponding author
E-mail addresses: ayugabrielaerta@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintahan Kota Banjarmasin, Staff Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Banjarmasin yang terkait dalam proyek TPS 3R, dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) sebagai pekerja TPS 3R. Penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui wawancara, observasi secara mendalam. Sedangkan data sekunder berasal dari artikel-artikel, dokumen, buku, jurnal ilmiah atau jurnal online. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif (*interactive model analysis*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a. Program Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R di Kecamatan Banjarmasin Utara

Implementasi Program Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R di Kota Banjarmasin merupakan bagian dari kebijakan lanjutan pemerintah daerah dalam merespons meningkatnya permasalahan persampahan perkotaan. Program ini secara substantif diarahkan untuk mengurangi timbunan sampah sejak dari sumber sebelum masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), melalui penerapan sistem pemilahan, pengolahan, dan daur ulang berbasis prinsip *reduce, reuse,* dan *recycle* (3R). Kehadiran TPS 3R diposisikan sebagai instrumen strategis dalam mengubah pola pengelolaan sampah yang semula berorientasi pada pengangkutan dan pembuangan akhir, menuju pendekatan pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah secara berkelanjutan.

Terkait keseragaman kebijakan, Kepala Bidang Kebersihan dan Pengolahan Sampah menegaskan bahwa TPS 3R di Kecamatan Banjarmasin Utara dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang diatur dalam regulasi kebijakan yang berlaku, dan regulasi tersebut juga diterapkan secara seragam di seluruh kecamatan di Kota Banjarmasin. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan kebijakan yang bersifat *top-down* dengan standar pelaksanaan yang sama pada setiap wilayah administratif.

Berikut 4 (empat) Regulasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R yang menjadi program kegiatan dari sebelum hingga beroperasionalnya TPS 3R, yaitu :

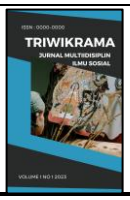
1. Perencanaan Teknis

Perencanaan teknik disusun berdasarkan rencana induk, hasil studi kelayakan dan persyaratan teknis yang ditetapkan. Petunjuk Teknis Program TPS 3R di Kecamatan Banjarmasin Utara dilaksanakan menurut Kementerian PUPR Tahun 2017. Pertama dilaksanakannya Rembuk Kesiapan Masyarakat Tingkat Titik Lokasi Terpilih Sub Bidang Persampahan

"Proses rembuk kesiapan ini kami laksanakan untuk membangun kesepakatan dan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat di titik lokasi yang telah ditetapkan sebagai usulan penanganan sampah. Kesepakatan tersebut disesuaikan dengan arahan kebijakan Program DAK Fisik Infrastruktur pada tahun anggaran berjalan. Sebelum program dilaksanakan, masyarakat di lokasi terpilih harus menyepakati untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan secara partisipatif, termasuk pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai prasyarat pelaksanaan program di tingkat RT, RW, dusun, atau kampung. Dengan adanya kesepakatan tersebut, masyarakat menyatakan kesiapan menerima Program DAK Fisik Infrastruktur di wilayahnya beserta konsekuensi yang melekat dalam pelaksanaan dan keberlanjutan program." (Wawancara pada 17 November 2025 dengan Staff PUPR)

Kedua dilaksanakannya Proses Pemilihan KSM Bidang Persampahan, sebagaimana dijelaskan oleh staff PUPR kota Banjarmasin, bahwa:

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



"Dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana persampahan TPS 3R, proses pemilihan pengurus KSM kami gunakan pola yang dianggap sudah memiliki tahapan yang jelas dan partisipatif, mulai dari musyawarah warga, penetapan struktur kepengurusan, hingga penetapan tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus, sehingga pelaksanaan kegiatan TPS 3R dapat berjalan lebih tertib dan akuntabel." (Wawancara pada 17 November 2025 dengan Staff PUPR)

Ketiga Proses Survei Timbunan dan Komposisi Sampah, proses ini dalam rangka untuk mengetahui komposisi dan timbunan sampah serta kondisi sosial masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan survei timbulan dan komposisi sampah bertujuan untuk memperoleh data dasar yang digunakan dalam penentuan pemilihan teknologi pengelolaan sampah, penyusunan program penyuluhan kepada masyarakat, serta sebagai tolok ukur pembanding dalam menilai keberhasilan program pengelolaan sampah yang akan dilaksanakan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh TPS 3R yang berada di Kecamatan Banjarmasin Utara telah melaksanakan perencanaan teknis secara mendalam dan sistematis sesuai dengan mekanisme perencanaan yang berlaku. Proses perencanaan tersebut mencakup pengumpulan data dasar melalui survei timbulan dan komposisi sampah, penentuan kapasitas pelayanan dan wilayah layanan, penyusunan desain teknis fasilitas dan alur pengolahan sampah, serta perhitungan kebutuhan sarana, prasarana, dan biaya operasional. Staff PUPR sebagai pelaksana pembuatan TPS 3R menjelaskan bahwa seluruh tahapan perencanaan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan teknis dan standar pengelolaan persampahan, serta disesuaikan dengan kondisi sosial, lingkungan, dan karakteristik timbulan sampah di masing-masing lokasi TPS 3R.

2. Pelaksanaan Pembangunan

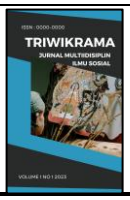
Kegiatan pembangunan dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan teknis yang telah disusun, yang mencakup tahapan persiapan pembangunan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang disertai dengan kegiatan pengawasan dan pengujian material, pelaksanaan uji coba laboratorium dan uji coba lapangan (*trial run*), uji coba sistem atau *commissioning test*, masa pemeliharaan, hingga proses serah terima pekerjaan. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara berurutan dan terintegrasi untuk memastikan bahwa hasil pembangunan memenuhi spesifikasi teknis, standar mutu, serta kesiapan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lingkup kegiatan dalam Pelaksanaan Pembangunan TPS 3R Kecamatan Banjarmasin Utara mencakup sebagai berikut: a) Pekerjaan persiapan mencakup pembersihan lapangan & perataan tanah, pengukuran & pasang *bowplank*; b) Pekerjaan tanah (galian, urugan); c) Pekerjaan Pondasi; d) Pekerjaan Struktur beton dan konstruksi baja; e) Pekerjaan air bersih dan sanitasi; f) Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Listrik; g) Pekerjaan pemasangan pagar; h) Pekerjaan pengecatan; i) Peralatan pengolah sampah; dan j) Pembelian alat angkut sampah;

Pada pelaksanaan pembangunan penjelasan teknis konstruksi dilakukan oleh PPK OPD/Dinas terkait bersama TFL Teknik kepada tim pelaksana swakelola, tukang, pekerja, dan masyarakat pengguna. Kegiatan berjalan sesuai kerja yang sudah dimuat didokumen RKM. Berdasarkan hasil wawancara, pelaporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi kegiatan harus dilakukan secara berkala seiring dengan pelaksanaan pembangunan TPS 3R. Setiap tahapan pekerjaan dilaporkan oleh tim pelaksana swakelola melalui laporan realisasi penggunaan keuangan dan progres fisik pekerjaan di lapangan. Progres fisik dilaporkan berdasarkan capaian pekerjaan konstruksi yang telah dilaksanakan, termasuk kegiatan penjelasan teknis konstruksi oleh PPK OPD/Dinas terkait bersama TFL Teknik kepada tim pelaksana, tukang, pekerja, dan masyarakat pengguna. Selain itu, dokumentasi kegiatan berupa foto lapangan, seperti penjelasan teknis pengecoran tanah oleh Dinas PUPR terkait ketinggian lantai dan arah buangan air, digunakan sebagai bukti fisik pelaksanaan pekerjaan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan monitoring dan evaluasi kegiatan.

*Corresponding author
E-mail addresses: ayugabrielaerta@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Berdasarkan hasil wawancara dan uraian pelaksanaan pembangunan kegiatan pembangunan TPS 3R di Kecamatan Banjarmasin Utara, dapat disimpulkan bahwa pembangunan telah dilaksanakan secara terencana dan sistematis dengan mengacu pada dokumen perencanaan teknis yang berlaku. Seluruh tahapan pembangunan, mulai dari persiapan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan dan pengujian material, uji coba sistem, masa pemeliharaan, hingga serah terima pekerjaan, dilaksanakan secara berurutan dan terintegrasi guna menjamin mutu bangunan serta kesiapan operasional fasilitas TPS 3R.

Pelaksanaan pembangunan juga menunjukkan kepatuhan terhadap standar mutu dan keselamatan kerja. Pendampingan teknis oleh PPK OPD, Dinas PUPR, dan TFL Teknik berperan penting dalam memastikan kesesuaian pekerjaan dengan dokumen perencanaan, sekaligus meningkatkan pemahaman tim pelaksana swakelola, tukang, dan masyarakat terhadap aspek teknis konstruksi.

Selain aspek teknis, pelaksanaan pembangunan diseluruh TPS 3R di Kecamatan Banjarmasin Utara juga didukung oleh sistem pelaporan dan dokumentasi yang tertib dan berjenjang. Pelaporan progres fisik dan realisasi keuangan dilakukan secara berkala oleh KSM dan disampaikan kepada PPK serta PA/KPA sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Pengaturan proporsi penggunaan dana serta dukungan kegiatan nonfisik melalui rembuk bersama masyarakat menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat partisipasi warga dan menjamin keberlanjutan pengelolaan TPS 3R pasca pembangunan (KPP).

3. Pengoperasian dan Pemeliharaan

Secara keseluruhan, fungsi pengoperasionalan dan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah/DLH telah mencakup aspek teknis, administratif, kelembagaan, serta pembinaan masyarakat. Berikut operasional yang dilakukan yang merujuk pada unsur 3R khususnya di Kecamatan Banjarmasin Utara, yaitu:

a) Pengumpulan Sampah

Pada pengoperasian awal, pengumpulan sampah memiliki metode yang diterapkan di seluruh TPS 3R Kecamatan Banjarmasin Utara yaitu dilakukan melalui dua mekanisme utama. Pertama, pengumpulan dilakukan oleh pekerja yang melayani penjemputsn sampah langsung dari rumah ke rumah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pengambilan biasanya menggunakan gerobak atau kendaraan roda 3 atau taso sesuai jarak atau keperluan yang ada. Kedua, sebagian masyarakat secara mandiri membawa sampah rumah tangganya ke wadah atau bin komunal/kontainer yang telah disediakan di titik-titik tertentu. Penerapan dua metode ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, aksesibilitas wilayah, serta tingkat partisipasi masyarakat setempat.

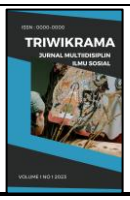
b) Pemilahan Sampah

Secara umum, pemilahan di TPS 3R dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pemilahan di sumber (rumah tangga) dan pemilahan lanjutan di TPS 3R oleh pekerja KPP. Setelah proses awal yaitu pengumpulan sampah yang belum terpilah dari sumber dilah dengan tahapan: Penerimaan dan penimbangan sampah sesuai jenis; Pemilahan manual di meja sortir untuk memisahkan organik, anorganik bernilai, dan residu; Pengelompokan anorganik berdasarkan material (plastik keras/lunak, kertas, logam); Pengolahan lanjutan: pengomposan, dijual dan diangkut ke TPA.

c) Pengolahan sampah organik dan pendaur ulangan sampah non organik

Berdasarkan hasil wawancara, jenis sampah yang didaur ulang di TPS 3R pada umumnya difokuskan pada sampah non organik yang memiliki nilai ekonomi relatif tinggi, seperti kertas, plastik, dan logam. Selanjutnya, ditambahkan bahwa pemasaran hasil daur ulang dari TPS 3R umumnya dilakukan melalui kerja sama dengan lapak atau pengepul, serta dalam beberapa kondisi langsung dengan industri pengguna bahan baku daur ulang. Pola kerja sama ini dipilih untuk memastikan keberlanjutan penyerapan hasil pilahan sampah anorganik dan mendukung

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



aspek ekonomi operasional TPS 3R. Namun sesuai dengan observasi tidak seluruh TPS 3R terlihat memiliki alat memadai untuk press plastik. Padahal dengan adanya alat press tempat penyimpanan sampah daur ulang mampu diminimalisir.

Sampah yang digunakan sebagai bahan baku kompos di TPS 3R adalah sampah organik yang telah terseleksi, terutama sampah dapur dan daun-daun hasil potongan tanaman. Pemilahan sampah organik menjadi prasyarat utama dalam proses pengomposan, karena tercampurnya sampah organik dengan sampah anorganik maupun residu dapat menurunkan kualitas kompos yang dihasilkan serta memperpanjang waktu pengolahan. Hal inilah yang membuat TPS 3R di Banjarmasin Utara tidak berjalan dengan baik karena kurangnya kegiatan pembuatan Kompos.

Metode pembuatan kompos yang diterapkan di TPS 3R dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya metode *open windrow* dan metode *caspary*. Metode *open windrow* dilakukan dengan menumpuk bahan organik di ruang terbuka dan melakukan pembalikan secara berkala, sedangkan metode *caspary* dilakukan dengan memanfaatkan ruang atau bak pengomposan tertutup untuk menjaga kestabilan proses dekomposisi. Pemilihan metode tersebut disesuaikan dengan ketersediaan lahan, sarana prasarana, serta kapasitas pengelolaan di masing-masing TPS 3R.

Tahap awal pemilahan sampah organik, dilanjutkan dengan proses pencacahan untuk memperkecil ukuran material agar mempercepat dekomposisi. Selanjutnya, bahan organik disusun atau dimasukkan ke dalam media pengomposan sesuai metode yang digunakan, kemudian dilakukan pengadukan atau pembalikan secara berkala untuk menjaga keseimbangan aerasi dan kelembapan. Tahap akhir berupa proses pematangan kompos hingga siap digunakan atau dipasarkan, setelah memenuhi kriteria kualitas yang ditetapkan.

d) Pengelolaan sampah B3

Seperti batu baterai dan lampu neon, narasumber menegaskan bahwa jenis sampah tersebut tidak diproses secara langsung di TPS 3R. Sampah B3 dikumpulkan secara terpisah untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

e) Pengumpulan sampah residu ke dalam kontainer untuk diangkut ke TPA sampah.

Sampah residu ini sebenarnya hanya meliputi antara lain popok sekali pakai, pembalut, styrofoam tercemar, serta material lain yang tidak memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Namun untuk di beberapa TPS 3R Kecamatan Banjarmasin Utara sampah-sampah datang terlambat dan dikarenakan area TPS sudah full, maka yang dianggap sampah residu menjadi lebih banyak. Belum lagi ditambah dengan sampah yang telah melalui proses pemilahan, sampah yang dianggap tidak ada nilai ekonominya tadi menjadi sampah residu dikumpulkan secara terpisah ke dalam kontainer yang telah disediakan di area TPS 3R.

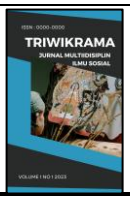
4. Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan melalui proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali, dengan tujuan memperoleh data dan informasi mengenai kinerja teknis dan nonteknis pengelolaan. Kinerja teknis yang dipantau meliputi kondisi dan fungsi sarana prasarana, aspek operasional pengelolaan, serta kualitas lingkungan sekitar lokasi kegiatan.

Sementara itu, kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil pemantauan terhadap standar, pedoman, manual, serta ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI), baik yang bersifat teknis maupun nonteknis, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan

*Corresponding author
E-mail addresses: ayugabrielaerta@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



kinerja pengelolaan secara berkelanjutan. Hasil observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan, menemukan bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengelolaan TPS 3R dilaksanakan secara berkala dan terjadwal.

Pemantauan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang meliputi kondisi dan fungsi sarana prasarana, proses operasional pengelolaan sampah dari pengumpulan hingga pengangkutan residu ke TPA, serta kualitas lingkungan di sekitar TPS 3R. Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar dalam menilai efektivitas pengelolaan sekaligus menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan hasil pemantauan terhadap standar, pedoman, manual, serta ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI), baik yang bersifat teknis maupun nonteknis.

Evaluasi tidak hanya digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pengelolaan TPS 3R, tetapi juga untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul di lapangan. Temuan evaluasi menunjukkan bahwa pada beberapa TPS 3R, seperti TPS 3R Taekwondo dan Kayu Bulan, terdapat permasalahan teknis yang memerlukan perbaikan, antara lain kondisi area pemilahan yang belum memenuhi aspek kebersihan dan kenyamanan kerja, sehingga dilakukan tindak lanjut berupa pengecoran lantai sesuai dengan kemampuan pendanaan yang tersedia. Namun demikian, hasil evaluasi juga mengungkap adanya keterbatasan dalam aspek pendanaan dan sumber daya manusia.

b. Faktor Penghambat Program Tempat Pengolahan Sampah (TPS) di 3R Kecamatan Banjarmasin Utara

1. Partisipasi Masyarakat

Salah satu faktor penghambat utama dalam pelaksanaan TPS 3R di Kecamatan Banjarmasin Utara adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumber. Meskipun telah dilakukan sosialisasi mengenai pemilahan dan pengurangan sampah, sebagian masyarakat masih memandang TPS 3R sebagai tempat pembuangan akhir sementara (TPS) konvesional, pemahaman atau ketidak pedulian masyarakat serta kurangnya kepatuhan terhadap waktu dan tata cara pembuangan sampah yang telah ditetapkan.

Kurangnya partisipasi masyarakat ini berdampak langsung pada meningkatnya beban kerja petugas TPS 3R, karena proses pemilahan harus dilakukan ulang di lokasi.

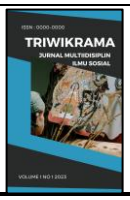
“Sebenarnya sebelum pelaksanaan operasional TPS 3R, pihak DLH dan KSM sudah melakukan sosialisasi terhadap seluruh masyarakat di wilayah yang akan menjadi Kawasan TPS 3R dibangun. Namun untuk selanjutnya setelah pengoperasional KSM sudah tidak bertugas lagi dilanjutkan oleh Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) sebagai pekerja TPS 3R, sebagai pekerja mereka hanya fokus ke sampah dan pelaksanaan 3R. Dikarenakan juga kurang meratanya Pendidikan pekerja maka dari itu informasi-informasi memerlukan bantuan dari seluruh lapisan pemerintahan seperti Lurah, RT dan RW setempat.” (Wawancara Tanggal 22 Oktober 2025 dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Pengolahan Sampah)

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor penghambat berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan TPS 3R. Jumlah dan kapasitas tenaga pengelola TPS 3R di Kecamatan Banjarmasin Utara selain TPS 3R Taekowndo belum cukup atau tidak sebanding dengan volume sampah yang masuk. Keterbatasan jumlah petugas menyebabkan kegiatan pemilahan dan pengolahan tidak dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, sebagian pengelola belum memperoleh pelatihan teknis yang memadai terkait pengoperasian peralatan, pengolahan kompos, serta manajemen operasional TPS 3R, sehingga kemampuan teknis yang dimiliki masih terbatas.

Sedangkan hasil observasi dilakukan diseluruh lokasi TPS 3R di Kecamatan Banjarmasin Utara, ada beberapa lokasi yang petugasnya tersedia kurang dari 4 orang. Namun, pekerja memang memiliki *jobdesk* masing-masing jadi beberapa memang ditugaskan menjadi penjemput sampah.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



3. Keterbatasan dan Kerusakan Infrastruktur TPS 3R

Faktor penghambat berikutnya adalah keterbatasan dan kerusakan infrastruktur, baik berupa sarana dasar maupun peralatan pengolahan sampah. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa pada beberapa TPS 3R di Kecamatan Banjarmasin Utara seperti TPS 3R Cemara Raya, seluruh peralatan pengolahan sampahnya mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan, meskipun sebelumnya telah dilakukan perbaikan dengan biaya mandiri oleh pengelola.

Dana yang harusnya untuk perbaikan alat pendukung kegiatan 3R dialokasikan menjadi pendanaan kegiatan akibat darurat sampah pada pertengahan tahun 2025. Yaitu, dana transportasi mobil pengangkut sampah yang setiap harinya mengeluarkan dana hampir 14jt perharinya. Pihak dinas PUPR maupun DLH juga mengusahakan pembangunan dan perbaikan TPS 3R dipercepat dan ditingkatkan.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa infrastruktur TPS 3R di Kecamatan Banjarmasin Utara belum sepenuhnya berada dalam kondisi layak operasional. Beberapa fasilitas dan peralatan pengolahan sampah, seperti mesin pencacah dan peralatan pendukung lainnya, mengalami kerusakan atau tidak berfungsi secara optimal akibat kurangnya pemeliharaan rutin. Kondisi infrastruktur yang tidak optimal ini menghambat proses pengolahan sampah, terutama pada tahap pengomposan dan daur ulang. Akibatnya, sebagian sampah yang seharusnya dapat diolah kembali justru menjadi sampah residu yang harus dikirim ke TPA, sehingga tujuan kebijakan TPS 3R untuk mengurangi beban TPA tidak tercapai secara maksimal.

Selain itu, melihat dari hasil evaluasi seluruh lokasi TPS 3R di Kecamatan Banjarmasin Utara, dilaporkan oleh DLH yang mana meminta dukungan dalam perbaikan infrastruktur TPS 3R. PUPR menjawab dengan bantuan menggunakan dana pribadi dinas PUPR. Dinas PUPR hanya mampu membatu perbaikan infrastuktur dengan me naikan lantai area pemilahan yang masih berupa tanah menjadi lantai dengan cor semen dan lapangan terbuka menjadi beratap. Hal tersebut dianggap mampu mengurangi hambatan operasional pekerja, terutama saat kondisi cuaca hujan.

4. Lemahnya Sistem Operasional dan Pemeliharaan

Penelitian ini juga menemukan bahwa sistem operasional dan pemeliharaan TPS 3R belum berjalan secara terencana dan berkelanjutan. Sebagian TPS 3R belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan secara konsisten selain juga karena alat yang rusak, SOP yang ada menjadi memudar dan lebih mengutamakan kegiatan manual dalam cara memilah, daur ulang, dan pengelolaan residu. Terkait SOP pemeliharaan, untuk petugas KPP, mereka tidak memiliki sistem pemeliharaan rutin. Serta dikarenakan keterbatasan anggaran operasional menyebabkan peralatan cepat rusak dan tidak segera diperbaiki. Akibatnya, kegiatan pengolahan sampah tidak dapat berjalan secara berkesinambungan. Meskipun secara normatif pemantauan dan evaluasi dari DLH dilakukan secara berkala, dalam praktiknya tindak lanjut dari hasil pemantauan tersebut masih lemah, dibuktikan dengan hasil observasi yang memdapati peralatan yang dialih fungsikan sebagai tempat menjemur dan wadah sanggahan sampah.

Pembahasan Hasil Penelitian

a. Evaluasi Program Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Kecamatan Banjarmasin Utara

1. Efektivitas

Program TPS 3R di Kecamatan Banjarmasin Utara belum sepenuhnya mencapai tujuan utamanya, yaitu pengurangan timbulan sampah dari sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sampah yang masuk ke TPS 3R masih dalam kondisi tercampur, sementara kegiatan pengolahan sampah organik, khususnya pengomposan, belum berjalan secara konsisten. Kondisi ini menyebabkan volume sampah residu yang diangkut ke TPA masih relatif tinggi. Dengan demikian, secara efektivitas, kebijakan TPS 3R belum memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan beban TPA sebagaimana yang diharapkan.

*Corresponding author
E-mail addresses: ayugabrielaerta@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

2. Efisiensi

Progrsm TPS 3R juga menghadapi berbagai kendala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, kerusakan peralatan pengolahan, serta desain sarana yang kurang ergonomis berdampak pada rendahnya produktivitas pengelolaan sampah. Sumber daya yang tersedia belum mampu menghasilkan output yang sebanding dengan potensi yang dimiliki TPS 3R. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya, baik tenaga kerja, peralatan, maupun anggaran, belum sepenuhnya efisien dalam mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

3. Kecukupan

Program TPS 3R belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan persampahan di Kecamatan Banjarmasin Utara secara menyeluruh. Meskipun keberadaan TPS 3R telah memberikan kontribusi terhadap pengelolaan sampah di tingkat kawasan, kapasitas pengolahan yang terbatas serta rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan kebijakan ini belum cukup kuat untuk mengatasi peningkatan timbulan sampah. Dengan kata lain, hasil kebijakan yang dicapai belum memadai jika dibandingkan dengan skala permasalahan persampahan yang dihadapi.

4. Pemerataan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat program TPS 3R belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Layanan pengelolaan sampah melalui TPS 3R lebih banyak pada jenis jemputan, yang mana pengantaran langsung oleh warga sangatlah jarang. sementara partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah di sumber masih rendah dan tidak merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat kebijakan belum sepenuhnya adil, baik dari sisi pelayanan maupun kesempatan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sampah berbasis 3R. Perlunya jugs penambahan TPS 3R lainnya di daerah TPS 3R yang tidak mampu menampung sampah (*overload*).

5. Responsivitas

Bagian penting dalam evaluasi progrsm TPS 3R. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas PUPR telah merespons temuan hasil pemantauan dan evaluasi dengan melakukan perbaikan fisik sarana prasarana, seperti pengecoran lantai area pemilahan dan penambahan atap bangunan. Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan respons tersebut belum dapat mencakup seluruh permasalahan, khususnya terkait penggantian peralatan pengolahan dan penambahan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat respons terhadap permasalahan, tingkat responsivitas kebijakan masih dibatasi oleh kapasitas fiskal dan kelembagaan.

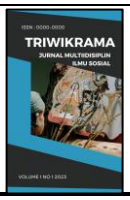
6. Ketepatan

Program TPS 3R secara konseptual telah dirancang untuk menjawab permasalahan persampahan melalui pendekatan pengurangan di hulu. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih lebih berorientasi pada pengelolaan sampah anorganik bernilai ekonomi, sementara pengolahan sampah organik belum berjalan optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa instrumen kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya tepat sasaran dalam menjawab karakteristik timbulan sampah yang didominasi oleh sampah organik.

Berdasarkan keseluruhan kriteria evaluasi kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa program TPS 3R di Kecamatan Banjarmasin Utara telah berjalan, namun belum optimal dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Evaluasi ini menunjukkan bahwa perbaikan kebijakan tidak hanya diperlukan pada aspek teknis operasional, tetapi juga pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan partisipasi masyarakat, penyediaan anggaran pemeliharaan dan peralatan yang memadai, serta penajaman fokus kebijakan agar lebih sesuai dengan karakteristik permasalahan persampahan di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, rekomendasi kebijakan operasional ini menegaskan bahwa peningkatan kinerja TPS 3R tidak cukup dilakukan melalui pembangunan fisik semata, tetapi memerlukan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



penguatan sistem pengelolaan yang mencakup aspek teknis, kelembagaan, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat. Implementasi rekomendasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kebijakan TPS 3R sebagai instrumen utama pengurangan sampah dari sumber dan mendukung terwujudnya sistem pengelolaan persampahan yang berkelanjutan di Kota Banjarmasin.

Tabel 1. Analisis Evaluasi Program TPS 3R Berdasarkan Kriteria William N. Dunn

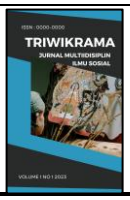
Kriteria Evaluasi (William N. Dunn)	Temuan Hasil Penelitian di TPS 3R Kecamatan Banjarmasin Utara	Implikasi Evaluasi	Rekomendasi Kebijakan Operasional
Efektivitas	Pengurangan timbulan sampah belum optimal; sebagian besar sampah masih tercampur dan pengomposan belum berjalan konsisten	Tujuan utama program 3R belum tercapai secara maksimal	Memperkuat pemilahan di sumber melalui penyuluhan berkelanjutan, pendampingan RT/RW, dan penguatan peran kelurahan
Efisiensi	Keterbatasan SDM, peralatan rusak, meja sortir tidak ergonomis, dan ruang kerja terbatas	Pemanfaatan sumber daya belum sebanding dengan output yang dihasilkan	Penataan ulang desain TPS 3R, perbaikan meja sortir, pengadaan/pergantian alat, serta penjadwalan pemeliharaan rutin
Kecukupan	Kapasitas TPS 3R belum mampu menampung dan mengolah seluruh timbulan sampah wilayah layanan	Kebijakan belum cukup menjawab skala permasalahan persampahan	Penyesuaian kapasitas TPS 3R, peninjauan wilayah layanan, dan kerja sama antar TPS 3R
Pemerataan	Manfaat TPS 3R belum dirasakan merata; partisipasi masyarakat masih rendah dan tidak merata	Distribusi manfaat kebijakan belum adil	Perluasan cakupan layanan, penambahan armada kecil, dan penguatan pengumpulan berbasis komunitas
Responsivitas	Evaluasi dilakukan, namun tindak lanjut terbatas akibat keterbatasan anggaran dan kewenangan	Respons terhadap masalah belum optimal	Penegasan pembagian kewenangan DLH atau PUPR, percepatan tindak lanjut hasil evaluasi, dan penyederhanaan mekanisme pelaporan
Ketepatan	Pengelolaan lebih fokus pada sampah anorganik bernilai; sampah organik belum tertangani optimal	Instrumen kebijakan belum sepenuhnya tepat sasaran	Memprioritaskan pengolahan sampah organik melalui penguatan pengomposan, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan pasar kompos

(Analisis Peneliti, 2025)

b. Faktor Penghambat Program Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Kecamatan Banjarmasin Utara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R di Kecamatan Banjarmasin Utara menghadapi sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R. Program TPS 3R pada dasarnya dirancang untuk mewujudkan pengurangan sampah dari sumber (*reduce*), pemanfaatan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*) sebagai upaya menekan volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Faktor penghambat yang ditemukan mencakup aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, dukungan anggaran,

*Corresponding author
E-mail addresses: ayugabrielaerta@gmail.com



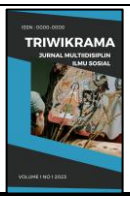
serta koordinasi kelembagaan.

1. Faktor sumber daya manusia, keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga pengelola TPS 3R menjadi hambatan utama. Jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan volume sampah yang dikelola menyebabkan proses pemilahan dan pengolahan sampah tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, keterbatasan kemampuan teknis pengelola dalam pemilahan lanjutan, pengomposan sesuai standar, serta pengelolaan hasil daur ulang bernilai ekonomi berdampak pada rendahnya efisiensi operasional dan kualitas output TPS 3R.
2. Faktor keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa fasilitas TPS 3R belum dirancang atau dipelihara secara optimal, seperti meja sortir yang tidak ergonomis, keterbatasan ruang kerja, serta kerusakan peralatan pengolahan sampah. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan sampah cenderung hanya difokuskan pada sampah anorganik bernilai ekonomi, sementara pengolahan sampah organik belum berjalan secara berkelanjutan.
3. Faktor rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah di sumber juga menjadi hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan TPS 3R. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi dan sosialisasi kebijakan belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat sesuai dengan prinsip 3R. Dengan tujuan utama dari prinsip 3R adalah membangun sistem pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat, di mana rumah tangga menjadi aktor awal dalam proses pemilahan dan pengurangan sampah. Dengan demikian, keberhasilan TPS 3R sangat bergantung pada perilaku, kesadaran, dan budaya masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya. Namun, hasil penelitian di Kecamatan Banjarmasin Utara menunjukkan bahwa aspek sosial budaya masyarakat belum sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan tersebut. Meskipun TPS 3R telah dibangun dan dilengkapi dengan infrastruktur pendukung, sebagian besar masyarakat masih belum menerapkan pemilahan sampah secara konsisten. Sampah yang masuk ke TPS 3R pada umumnya masih tercampur, sehingga tujuan utama pengurangan sampah dari sumber belum dapat tercapai secara optimal.

   Secara sosial, perilaku masyarakat dalam mengelola sampah masih didominasi oleh pola lama, yaitu membuang sampah tanpa memilah dan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pengelolaan kepada petugas atau pemerintah. Sampah masih dipersepsikan sebagai barang sisa yang tidak memiliki nilai guna, sehingga tidak muncul kesadaran bahwa pemilahan merupakan bagian penting dari tanggung jawab individu dan rumah tangga.

   Dari perspektif sosial budaya, masyarakat cenderung memilih cara yang dianggap paling praktis dan cepat, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Pemilahan sampah dianggap sebagai aktivitas tambahan yang merepotkan dan tidak memberikan manfaat langsung secara ekonomi. Selain itu, lemahnya penerapan sanksi sosial maupun administratif menyebabkan masyarakat tidak merasa memiliki kewajiban moral maupun hukum untuk menaati aturan persampahan yang telah ditetapkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa norma sosial terkait pengelolaan sampah belum terbentuk secara kuat. Tidak adanya tekanan sosial dari lingkungan sekitar menyebabkan perilaku membuang sampah tanpa memilah tetap berlangsung. Akibatnya, tujuan TPS 3R untuk membentuk budaya baru dalam pengelolaan sampah belum tercapai secara menyeluruh.
4. Faktor keterbatasan anggaran operasional dan pemeliharaan menjadi penghambat dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi. Keterbatasan dukungan pembiayaan menyebabkan perbaikan dan penggantian peralatan yang rusak tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga berdampak pada menurunnya kinerja operasional TPS 3R. Dari sisi kelembagaan, koordinasi antarinstansi terkait, meskipun telah terbentuk, belum sepenuhnya berjalan efektif, terutama dalam pembagian kewenangan pemeliharaan dan pengembangan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



fasilitas TPS 3R.

Secara keseluruhan, faktor penghambat implementasi program TPS 3R di Kecamatan Banjarmasin Utara bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Oleh karena itu, upaya perbaikan kebijakan memerlukan pendekatan terpadu yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis operasional, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia, peningkatan partisipasi masyarakat, dukungan anggaran yang berkelanjutan, serta penguatan koordinasi kelembagaan agar tujuan pengelolaan sampah berbasis 3R dapat tercapai secara optimal.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

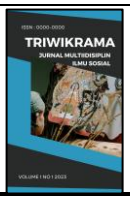
Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa Program TPS 3R di Kecamatan Banjarmasin Utara merupakan bentuk intervensi kebijakan publik pemerintah daerah dalam merespons persoalan persampahan perkotaan, khususnya untuk menekan timbulan sampah dari sumber dan mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pertama, dari aspek efektivitas, program TPS 3R belum mampu mencapai tujuan utama pengurangan sampah dari sumber secara signifikan. Rendahnya pemilahan di sumber dan belum konsistennya pengomposan menyebabkan residu yang diangkut ke TPA masih tinggi. Kedua, dari aspek efisiensi, keterbatasan SDM, kerusakan peralatan, serta kondisi sarana kerja yang tidak ergonomis menyebabkan pemanfaatan sumber daya belum sebanding dengan output pengurangan sampah yang dihasilkan. Ketiga, dari aspek kecukupan, kapasitas TPS 3R dan dukungan implementasi yang tersedia belum memadai untuk menjawab skala permasalahan persampahan di wilayah layanan, sehingga program belum cukup kuat menahan peningkatan timbulan sampah. Keempat, dari aspek pemerataan, manfaat layanan TPS 3R belum dirasakan secara adil karena cakupan layanan dan partisipasi masyarakat dalam pemilahan tidak merata. Kelima, dari aspek responsivitas, pemerintah daerah telah menunjukkan respons melalui perbaikan fisik sarpras, namun respons terhadap kebutuhan strategis seperti penggantian peralatan utama dan penambahan tenaga kerja masih terbatas oleh kewenangan dan kapasitas fiskal. Keenam, dari aspek ketepatan, program TPS 3R secara konsep tepat karena menarget pengurangan di hulu, tetapi implementasi di lapangan masih cenderung berfokus pada sampah anorganik bernilai ekonomi, sementara sampah organik yang umumnya mendominasi timbulan rumah tangga belum tertangani optimal melalui pengomposan yang stabil dan berkelanjutan.

Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa TPS 3R di Kecamatan Banjarmasin Utara telah berjalan sebagai program kebijakan publik dan memiliki kontribusi nyata dalam pengelolaan sampah berbasis kawasan. Namun, kinerja program belum optimal dan belum konsisten sebagai instrumen utama pengurangan sampah dari sumber. Akar persoalan utama bukan semata pada pembangunan fisik fasilitas, melainkan pada lemahnya penguatan operasional dan pemeliharaan, keterbatasan sumber daya manusia, kerentanan sarana/peralatan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan, serta belum kuatnya dukungan anggaran dan mekanisme tindak lanjut evaluasi. Dengan demikian, perbaikan program TPS 3R perlu diarahkan pada penguatan sistem pengelolaan yang terpadu meliputi aspek teknis, kelembagaan, pendanaan, dan perubahan perilaku masyarakat agar tujuan pengelolaan sampah berbasis 3R dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Banjarmasin.

Saran

a. Pemerintah Kota Banjarmasin perlu memperkuat program TPS 3R melalui peningkatan komitmen anggaran yang berkelanjutan, khususnya untuk pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur TPS 3R serta pengadaan peralatan pengolahan sampah yang memadai. Selain itu,

*Corresponding author
E-mail addresses: ayugabrielaerta@gmail.com



pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan turunan yang lebih operasional, termasuk mekanisme insentif dan sanksi, guna mendorong kepatuhan masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah di sumber.

b. Hendaknya, Dinas Lingkungan Hidup sebagai OPD teknis perlu meningkatkan intensitas pembinaan dan pelatihan teknis bagi pengelola TPS 3R secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas, agar pengelolaan TPS 3R tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mengoptimalkan aspek teknis pengolahan sampah. Selain itu, sistem pemantauan dan evaluasi perlu diperkuat dengan tindak lanjut yang jelas terhadap temuan lapangan.
c. Perlu adanya evaluasi terhadap Pengelola TPS 3R. Diharapkan pihak ini dapat meningkatkan tata kelola operasional, khususnya dalam penerapan pemilahan lanjutan, pengomposan, dan pengelolaan hasil daur ulang. Pengelola juga perlu membangun kemitraan yang lebih aktif dengan pihak lapak, industri daur ulang, dan komunitas lingkungan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari hasil pengolahan sampah, sehingga keberlanjutan operasional TPS 3R dapat terjaga.
d. Untuk masyarakat sekitar sebagai kelompok sasaran kebijakan perlu didorong untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah berbasis 3R, khususnya melalui pemilahan sampah sejak dari sumber. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif, pemberdayaan komunitas, serta pelibatan tokoh masyarakat dan kelembagaan lokal dalam program TPS 3R.

5. DAFTAR PUSTAKA

Anderson, J. E. (2011). *Public Policymaking*. Boston: Wadsworth Cengage Learning.

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dye, T. R. (2005). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.

Jones, C. O. (1977). *An Introduction to the Study of Public Policy*. North Scituate: Duxbury Press.

Keliat, H. B. (2022). Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Namo Rambe. *Jurnal Medan: Universitas Medan Area*.

Lasswell, H. D. (1951). The Policy Orientation. In *The Policy Sciences*. Stanford: Stanford University Press.

Van Meter, D., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work. *Journal Administration and Society*.